

**PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SISTEM *E-PURCHASING* PERSPEKTIF *GOOD GOVERNANCE*
(STUDI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BANTUL)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

**YOGI MIFTAHUL FAHMI
NIM 13340065**

PEMBIMBING :

- 1. NURAINUN MANGUNSONG S.H., M.Hum.**
- 2. Dr. EUIS NURLAELAWATI, M.A.**

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan informasi membawa dampak perubahan dalam dunia pemerintahan khususnya dalam dunia pengadaan barang/jasa pemerintah. Perkembangan tersebut ditandai dengan mulai dilaksanakannya pengadaan barang/jasa melalui sistem *e-purchasing* pada katalog elektronik (*e-catalog*). E-purchasing sendiri diartikan sebagai tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik. Pelaksanaan *e-purchasing* dipandang dapat menyelenggarakan pengadaan barang/jasa yang efektif dan efisien, berdaya saing, transparan, dan lebih memberikan kepastian hukum. Hal tersebut tentu sejalan dalam rangka menciptakan *good governance* dalam penyelenggaraan Negara, belanja kebutuhan publik dan pelayanan publik. Pada tahun 2014 pengadaan melalui *e-purchasing* juga mulai dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 17 Tahun 2012 dan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2013. Dengan mulai diterapkannya *e-purchasing* menjadi penting dan menarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *e-purchasing* pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta melihat implikasi dari diterapkannya *e-purchasing* dalam pemenuhan kebutuhan kantor dan menjaga kelancaran pelayanan publik dalam pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana bidang jalan dan cipta karya di Kab. Bantul tahun 2014.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif-analisis* yang berlokasi di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan narasumber dan pengolahan data terhadap data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan *e-purchasing*. Masalah yang ada dalam penelitian ini kemudian di analisis dengan pendekatan *Yuridis-Empiris* yang didasarkan pada teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori reformasi birokrasi, *good governance*, dan otonomi daerah.

Hasil dari penelitian menunjukkan *pertama*, bahwa pelaksanaan *e-purchasing* pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. *Kedua*, pengadaan dengan cara *e-purchasing* berimplikasi pada pelaksanaan pengadaan yang efektif dan efisien dari segi waktu dan anggaran, transparan, akuntabel, penciptaan persaingan usaha yang sehat, dan sangat mengarah pada penciptaan *good governance*.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yogi Miftahul Fahmi

NIM : 13340065

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: **Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Sistem *E-Purchasing* Perspektif Good Governance (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul)**, seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan berdasarkan etika keilmuan.

Yogyakarta, 19 Mei 2017

Yang menyatakan,



YOGI MIFTAHUL FAHMI

NIM: 13340065



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Yogi Miftahul Fahmi

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

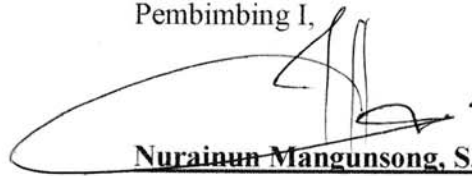
Nama : Yogi Miftahul Fahmi
NIM : 13340065
Judul : **“Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Sistem E-Purchasing Perspektif Good Governance (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 - 5 - 2017
Pembimbing I,


Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Yogi Miftahul Fahmi

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

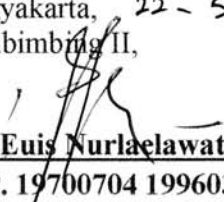
Nama : Yogi Miftahul Fahmi
NIM : 13340065
Judul : **“Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Sistem E-Purchasing Perspektif Good Governance (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 - 5 - 2017
Pembimbing II,


Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 515614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-284/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SISTEM E-PURCHASING PERSPEKTIF
GOOD GOVERNANCE (STUDI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BANTUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YOGI MIFTAHUL FAHMI
Nomor Induk Mahasiswa : 13340065
Telah diujikan pada : Senin, 29 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 29 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhan-mulah (Allah SWT) engkau berharap”

(Q:S Al Insyirah:7-8)

YAKIN USAHA SAMPAI

“Hard work does not guarantee success, but now work guarantee failure”

(Cesc Fabregas)

“No Matter who you are. It’s the simple things in life tha lead you to believe that you can achieve anything”

(Ronaldinho)

PERSEMBAHAN

*Dengan penuh syukur dan Rahmat Ridho Allah SWT
Untuk yang selalu mendukungu serta yang selalu mendoakanku
Dengan penuh harapan, kasih sayang dan penuh cinta
maka dengan rasa syukur dan penuh terimakasih kupersembahkan skripsi ini
kepada:*

Kedua orang tuaku Ayahanda Artalim dan Ibunda Jumaenah yang menjadi sumber semangat dan tiada henti selalu mendidik, memberikan motivasi dan do`a tulus yang selalu dipanjatkan

Untuk kedua Adikku Fadli Fadillah Nurrohmat dan Dinda Safira Khoerunnisa dan segenap Keluarga Besar yang memberikan dukungan, semangat dan menyayangiku

Serta Teman-teman

Prodi Ilmu Hukum 2013 dan HMI yang selalu menjadi tempat untuk berdiskusi, bermain dan menjadi tempat menuang tinta sejarah selama kurang lebih 4 tahun ini.

Dan

Untuk segenap Dosen Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum

serta

Almamater ku Tercinta

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan berkah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata 1 dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan Judul: “Pengadaan Barang/Jasa Melalui Sistem E-Purchasing Perspektif Good Governance (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul”

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan umatnya yang senantiasa melaksanakan sunnah dan berpegang teguh pada ajaran Islam sampai akhir nanti. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran beberapa pihak yang telah memberikan dorongan, bimbingan, dan pengarahan. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan hati penyusun ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Drs KH Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H. M.Hum. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum.

4. Ibu Nurainun Mangunsonh, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Euis Nurlaelawati M.A., selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa sabar, tulus dalam meluangkan waktu dan memberikan masukan-masukan kepada penyusun dalam penulisan skripsi ini.
5. Hifdzil Alim.,S.H.,M.H., yang sudi meluangkan waktunya untuk berbagi cerita dan berdiskusi baik dalam persoalan-persoalan hukum dan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmunya.
7. Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum yang sangat sabar dalam melayani dan memberikan arahan-arahan.
8. Bapak Bobot Ariff`iaidin , S.T., M.T. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul yang telah memberikan ruang untuk dapat melakukan penelitian pada dinas tersebut.
9. Bapak Rusdy Aryanta selaku narasumber dan seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul yang turut membantu dalam memberikan data-data terkait dengan penelitian ini.
10. Ayahanda Artalim, S.Pd dan Ibunda Jumaenah, S.Pd yang senantiasa memberikan cinta dan kasih sayangnya dalam situasi apapun, memberikan dukungan, semangat dan pengorbanan yang tak ternilai agar penyusun dapat menyelesaikan studi dan penulisan Skripsi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

11. Adik ku Fadli Fadillah Nurrohmat dan Dinda Safira Khoerunnisa yang selalu memberikan dukungan dan menjadi penyemangat.
12. Semua teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Hukum angkatan 2013, Samir, Ivan, Imam, Nabila, Anna Mukti, Adi, Nada, Fariz, Anwar S, Nur Anwar, Momo, Prames, Lala, Nadia, Intan, Mbak Hari, Nabila, Sovia, dll yang selalu bersama-sama belajar dan mengarungi suka duka di kampus ini.
13. Tim Futsal Ilmu Hukum 2013, Fikri, Yoga, Fajar, Yanrisa, Ridwan, Haydar, Ozy, Raka, Rizka, Pandu, Asa, Edi, dll yang mejadi teman didalam dan diluar lapangan.
14. Para legend dan veteran, Bang Agus, Bang Imron, Bang Ray, Nanda, Tanto, Ridhal, Zainal, Bang Fahmi, Bang Dio, Bang Rajul dan Bang Amin yang telah membawa paham dan menjadikan ngopi menjadi aktivitas utama diluar kampus.
15. Segenap keluarga besar HMI Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan banyak ruang dan proses dalam mengembangkan dan membentu diri saya.
16. Abi, Gibran, Andrika, Ulfah, Akbar, Sidiq, Billy dan segenap kawan seperantauan Mahasiswa 204 Jogja.
17. Teman-teman KKN Sangurejo, Wonokerto Qodim, Hasan, Wisnu, Hilda, Ayu, Affifah, Laili dan Foya
18. Bapak dan Ibu Kost Wisma Tape, Panji, Fadil, Amin, Wawan, Ridho, Dika, Fikri, Singgih, dan Bang Rosi.

19. Semua pihak yang terlibat yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai semua amal baik yang telah diberikan. Penyusun sadar bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan tentu kritik dan masukan yang membangun tetap dibutuhkan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 22 Mei 2017

Penyusun,

Yoga Miftahul Fahmi



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PEGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	9
F. Kerangka Teoritik	12
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Pembahasan	25

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG GOOD GOVERNANCE
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

A. Tinjauan tentang Good Governance	
1. Sejarah dan Pengertian <i>Good Governence</i>	27
2. Prinsip <i>Good Governace</i>	30
3. Aktor <i>Good Governace</i>	35
4. Hubungan Pengadaan Barang/Jasa Dengan <i>Good Governace</i>	37
B. Tinjauan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
1. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	38
a. Pengertian	38
b. Komponen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	38
2. Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa	41
3. Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	44
4. Etika dan Norma dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	46
C. Tinjauan tentang <i>Electronic Procurement</i>	
1. Pengertian <i>E-Procurement</i>	47
2. Manfaat <i>E-Procurement</i>	51
3. Tahapan pelaksanaan <i>e-procurement</i>	54

D. Tinjauan tentang <i>E-Purchasing</i>	
1. Pengertian <i>E-Purchasing</i> dan <i>E-Catalog</i>	55
2. Para Pihak dalam E-Purchasing.....	58
3. Mekanisme Pelaksanaan <i>E-Purchasing</i>	63

BAB III TINJAUAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PELAKSANAAN *E-PROCUREMENT* DAN *E-PURCHASING*

A. Tinjauan Umum Kabupaten Bantul	
1. Letak Wilayah	69
2. Karakteristik Wilayah.....	69
B. Tinjauan Umum Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bantul	
1. Kedudukan.....	70
2. Visi dan Misi.....	71
3. Struktur Organisasi	73
4. Fungsi	74
C. Tinjauan Pelaksanaan <i>E-Procurement</i>	73
D. Tinjauan Pelaksanan <i>E-Purchasing</i>	75

BAB IV ANALISIS PRAKTIK PENGADAAN MELALUI

SISTEM E-PURCHASING

A. Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Sistem <i>E-Purchasing</i>	86
B. Implikasi Pengadaan Barang/Jasa Melalui Sistem <i>E-Purchasing</i>	95
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pelaksanaan *E-purchasing* Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul Tahun 2014



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar alur proses *e-purchasing* dengan negosiasi harga
2. Gambar alur proses *e-purchasing* tanpa negosiasi harga



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semenjak berakhirnya kekuasaan rezim orde baru dan bersamaan dengan gerakan reformasi dalam sistem politik pemerintahan berkembang pula pemikiran tentang *good governance*. *Good governance* yang lahir dari reformasi politik dan pemerintahan diharapkan dapat membuat perubahan dan perkembangan dalam pelayanan publik. Namun, pada kenyataannya dalam sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) masih dirasa belum optimal dan manfaatnya belum begitu dirasakan oleh publik. Hal ini dapat dilihat dengan masih maraknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang masih berlangsung hingga detik ini.¹ Konsep *good governance* dalam hal tingkat efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi pemerintahan dipandang belum optimal dan kualitas pelayanan publik masih jauh dari harapan.

Permasalahan birokrasi yang mengemuka dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik tak terkecuali menyangkut hal pengadaan barang/jasa pemerintah yang masih sangat rawan dengan korupsi. Pelaksana tugas Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Cahya Harefa menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, hingga 2015, kerugian negara akibat korupsi pada sektor pengadaan barang dan

¹ I Nyoman Sumardi, *Reformasi Birokrasi Pemerintahan Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Cetakan Pertama, (Bogor:Ghalia Indonesia,2016) hlm. 1

jasa nilainya mencapai Rp 1 triliun. Menurutnya, korupsi yang terjadi selama ini akibat ketidakefektifan anggaran dan adanya dugaan persekongkolan.²

Beberapa kalangan berpendapat mengenai adanya indikasi korupsi dalam pengadaan barang/jasa diantaranya, *Indonesia Procurement Watch* (IPW) mengidentifikasi faktor penyebab korupsi dalam pengadaan barang/jasa, *pertama* lemahnya kerangka hukum dan kelembagaan; *kedua*, lemahnya kapasitas pengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah; *ketiga*, lemahnya kepatuhan terhadap peraturan, pengawasan dan penegakkannya. Lebih lanjut Adrian Sutedi dan Emil Salim mengemukakan pendapatnya yang tidak jauh berbeda, bahwa permasalahan korupsi dalam pengadaan barang/jasa bahwa adanya persekongkolan pada proses tender, sistem yang dipakai, liberalisasi dan monopoli perdagangan.³

Pengadaan barang/jasa sejatinya harus dilaksanakan secara kredibel melalui pengaturan yang baik, independen, adil, transparan, profesional dan kompetitif. Sehingga jika semua itu dilaksanakan dapat mencegah KKN dan iklim yang persaingan udara yang tidak sehat karena adanya persekongkolan antara aparat pemerintah dan pelaku usaha.⁴ Seiring perkembangan era globalisasi yang juga melanda Indonesia, dunia pemerintahan dalam negeri pun turut mengambil manfaat dari perkembangan *information communication*

²<http://nasional.kompas.com/read/2016/06/27/17234861/negara.rugi.hampir.rp.1.triliun.dari.korupsi.pengadaan.barang.dan.jasa> akses 28 Februari 2017 Pukul 20:22 WIB

³Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Cetakan Ke-I, (Yogyakarta;Genta Publishing,2010) hlm. 14. Lihat juga Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan berbagai Permasalahannya*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), hlm. 8

⁴ Agus Kuncoro, *Begini Tender Yang Benar*, (Yogyakarta:Primaprint,2013) hlm, 3

technologies (ICT) dengan mulai diterapkannya aplikasi/sistem berbasis internet yang dikenal dengan *electronic government*⁵ (*e-government*). Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk kesejahteraan masyarakat.

Selain itu juga pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan, berdampak dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dan lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Manfaat dari berkembangnya teknologi turut dirasakan pada dunia pengadaan barang/jasa. Dunia pengadaan barang/jasa bertransformasi dari tadinya pengadaan dilakukan secara konvensional kemudian beralih menjadi pengadaan yang dilakukan secara elektronik. Dalam Pasal 1 angka 37 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Maksud dari butir ini adalah proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik terutama berbasis

⁵ *Electronic government* atau biasa disingkat menjadi *e-government*. Di Indonesia, *e-government* merujuk pada penggunaan komputer dalam prosedur pelayanan yang diselenggarakan oleh organisasi pemerintah. Implementasi *e-government* di Indonesia semakin massif dan berkembang setelah dikeluarkannya Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Selengkapnya lihat dalam buku Richardus Eko. *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. (Yogyakarta: ANDI, 2004)

web dan internet.⁶ Bahkan, *e-procurement* sendiri dianggap sebagai salah satu inisiatif *e-government* yang paling efektif memberikan hasil nyata dalam bentuk transparansi dan efisiensi proses pengadaan pemerintah.⁷

Berdasarkan Pasal 106 Perpres 54 Tahun 2010, pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan cara *e-tendering*⁸ atau *e-purchasing*.⁹ Seiring dengan perkembangan dan perubahan pola belanja pemerintah menuntut penyesuaian dalam tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah yang tadinya pelaksanaan pengadaan dilaksanakan secara lelang terbuka secara *online* atau *e-tendering*. Kini, satu terobosan baru yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) adalah dengan memperkenalkan sistem katalog elektronik atau *katalog elektronik*¹⁰ di awal tahun 2012 untuk memulai pengadaan dengan cara *e-purchasing*.

Katalog elektronik dikembangkan dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk dimanfaatkan oleh seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi

⁶ Septian Aprelly, Studi Pengaruh Penerapan *E-Procurement* Terhadap Kinerja Dan Efisiensi Pengadaan Jasa Konstruksi Di Pemerintah Kota Yogyakarta, *Tugas Akhir*, Diploma Teknik Sipil, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, 2014, hlm. 1

⁷ Yudho Giri dan Yoya Ruldeviyani, Implementasi *e-Procurement* sebagai Inovasi Pelayanan Publik, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2009, hlm. 32

⁸ Pasal 1 Angka 39 Perpres 54 Tahun 2010 menjelaskan bahwa *e-tendering* adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

⁹ *e-purchasing* menurut Pasal 1 Angka 41 Perpres 54 Tahun 2010 adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.

¹⁰ Katalog elektronik atau *e-catalog* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 1 Angka 7

(K/L/D/I) dalam rangka pengadaan barang dan jasa memenuhi kebutuhan kantor. Dengan sistem ini pengadaan barang/jasa dipandang bisa lebih efektif dan efisien dalam ketepatan serta kecepatan waktu dan lebih menghemat biaya. Sistem ini lebih transparan karena daftar, jenis, spesifikasi teknis serta harga barang dari penyedia ditampilkan secara elektronik dan dapat diakses oleh publik secara luas.¹¹

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kab. Bantul menjadi salah satu dinas yang telah menerapkan kebijakan pelaksanaan *e-purchasing* sejak 2014. Dinas ini memegang peranan penting dalam pelayanan publik dan penunjang perekonomian di Bantul. Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana bidang jalan dan cipta karya, merupakan sederet tanggung jawab yang diemban dinas ini dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menunjang pembangunan di Kabupaten Bantul. Untuk memenuhi semua kebutuhan belanja publik itu tentu caranya dengan melakukan pengadaan barang/jasa.

Konsekuensi dari adanya perubahan pola dalam pengadaan barang/jasa yang terbaru, membuat segala kebutuhan belanja barang/jasa dapat dilaksanakan melalui *e-purchasing* sepanjang apa yang dibutuhkan dimuat didalam katalog elektronik berdasarkan Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 17 Tahun 2012 dan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2013.

¹¹ Faisal Rahadian, Analisis Perbandingan Penerimaan Dan Kepuasan Pengguna Terhadap Aplikasi E-Purchasing Di Pemerintah Kabupaten Sleman, *Tesis*, Fakultas Teknik. Universitas Gadjah Mada, 2015, hlm. 2

Apalagi pada tahun 2015 terbit Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015 sebagai respon perubahan pada Pasal 110 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur bahwa Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) wajib melakukan *e-Purchasing* terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I.

E-Purchasing dipandang sebagai salah satu cara untuk mempercepat dan mempermudah transaksi pengadaan dalam memenuhi kebutuhan belanja publik. Sejak kemunculan katalog elektronik dan pembelian melalui aplikasi *e-purchasing*, awalnya hanya menawarkan pembelian secara online produk kendaraan bermotor, di tahun 2013 menjadi 2112 dan 5.397 berbagai produk di tahun 2014 yang di antaranya telah memuat obat-obatan, alat berat dan roda 4 dari berbagai merek terkenal di Indonesia.¹²

Meski begitu pelaksanaan *e-purchasing* bukan tanpa masalah. Seperti misalnya dalam hal ketersediaan barang yang tercantum di katalog elektronik yang terkadang tidak ada, kesesuaian antara harga, jenis dan spesifikasi katalog elektronik dengan proses pelaksanaan dilapangan, kebutuhan mendesak akan suatu barang namun tak dapat dipenuhi hingga kesiapan sumber daya manusia dalam melakukan *e-purchasing* dan iklim persaingan usaha yang dipandang menjadi monopolistik dan mematikan persaingan usaha tingkat lokal masih menjadi sorotan.

¹² <http://report-lpse.lkpp.go.id/v2/beranda> akses 29 April 2017 Pukul 19:12

Hal ini yang harus dicermati pada bermuaranya potensi masalah dan risiko. Risiko terkait dengan perubahan aturan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah potensi masalah yang kemungkinan timbul pada implementasi aturan yang begitu cepat berubah imbas dari berkembangnya proses dalam pengadaan barang/jasa. Tanpa kesiapan pemerintah dan *stakeholders* hal ini bisa saja menghambat pencapaian tujuan pengadaan barang/jasa, yaitu efisien, efektif dan ekonomis.¹³

Dari uraian latar belakang yang disampaikan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum mengenai *e-purchasing* di tingkat pemerintah daerah. *E-purchasing* yang notabene merupakan pengadaan secara elektronik yang tidak dilakukan dengan cara lelang merupakan konsep baru yang telah dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul. Tentu hal ini akan menarik diteliti bagaimana *das solen* dan *das sein* dalam pelaksanaan *e-purchasing* di Dinas Pekerjaan Umum ini. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul “*Pengadaan Barang/Jasa Melalui Sistem E-Purchasing Perspektif Good Governance (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul)*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, beberapa permasalahan yang menarik untuk diteliti, yaitu sebagai berikut :

¹³ Bahrudin Yusuf T, “Strategi Bersaing CV Tunas Abadi Sebagai Holding Dalam Hal Pengadaan Barang Dengan Sistem E-Purchasing” *Tesis*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, 2016. Hlm. 6

1. Apakah pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui sistem *e-purchasing* di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul Tahun 2014 sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala LKPP nomor 17 Tahun 2012 Tentang *E-Purchasing*?
2. Apakah implikasi pengadaan barang/jasa di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul sebelum dan sesudah dilaksanakannya *e-purchasing*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui sistem *e-purchasing* di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul Tahun 2014 dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala LKPP nomor 17 Tahun 2012 Tentang *E-Purchasing*.
2. Untuk melihat implikasi pengadaan barang/jasa di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul sebelum dan sesudah dilaksanakannya *e-purchasing*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi Ilmu Hukum khususnya Hukum Tata Negara maupun Hukum Administrasi Negara mengenai pengadaan barang/jasa secara elektronik. Sehingga berbagai problema dalam pengadaan barang/jasa khususnya yang dilaksanakan secara elektronik dapat diatasi dan ditemukan solusinya dengan baik.

2. Kegunaan Praksis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat, pihak swasta dan birokrasi pemerintahan tentang sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik serta menjadi masukan, bahan pertimbangan, evaluasi bagi pihak terait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya dalam pengadaan barang/jasa.

E. Telaah Pustaka

Untuk melengkapi penelitian ini, penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terhadap tema yang penulis angkat untuk menghindari terjadinya kesamaan penelitian. Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai referensi, akan penulis ulas terhadap beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan apa yang penulis teliti.

Skripsi dari Gusty Abdillah Rizky N “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Sistem E-Purchasing”.¹⁴ Dalam penelitian ini yang dibahas

¹⁴ Gusty Abdillah risky N, “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Sistem E-Purchasing”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2015.

mengenai alasan digunakanya *e-purchasing* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan tanggung jawab dari LKPP ketika terdapat permasalahan juga akibat hukum jika terjadi ketidak sesuaian dari yang tertera dalam katalog elektronik dengan proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlangsung. Sementara yang akan penulis teliti adalah implementasi *e-purchasing* serta mengetahui implikasi sesudah dan sebelum *e-purchasing* digunakan dalam pengadaan barang/jasa di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul

Kemudian Tesis dari Andryani Ningsih yang berjudul “Hubungan Penerapan Elektronik Katalog Terhadap Efisiensi Pengadaan Dan Ketersediaan Obat Di RSUD Kelas B Yogyakarta”.¹⁵ Dalam penelitian yang dibahas mengenai hubungan penerapan e-katalog dari persiapan, pelaksanaan, manfaat kendala secara *e-purchasing* dan *manual-purchasing* terhadap efisiensi pengadaan obat dan ketersediaan obat di RSUD Kota Yogyakarta. Dalam kesimpulan penelitian ini adalah penerapan e-katalog baik secara *e-Purchasing* dan *manual-Purchasing* meliputi indikator persiapan, pelaksanaan, dan manfaat kendala memiliki hubungan yang signifikan dengan efisiensi pengadaan dan ketersediaan obat di RSUD Kelas B di Yogyakarta. Perbedaan penelitian ini dengan apa yang penyusun teliti jelas sangat berbeda. Apa yang penulis teliti yaitu pada pelaksanaan *e-purchasing* dibanding dengan penelitian diatas yang lebih pada efisiensi katalog elektronik.

¹⁵ Andryani Ningsih, “Hubungan Penerapan Elektronik Katalog Terhadap Efisiensi Pengadaan Dan Ketersediaan Obat Di Rsud Kelas B Yogyakarta”, *Tesis*, Prodi Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Gadjah Mada, 2015.

Selanjutnya, Tesis dari Faisal Rahadian yang berjudul “Analisis Perbandingan Penerimaan dan Kepuasan Pengguna Terhadap Aplikasi E-Purchasing di Pemerintah Kabupaten Sleman”.¹⁶ Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerimaan pengguna dan kepuasan pengguna terhadap penerapan aplikasi e-purchasing, mengetahui perbedaan penerimaan pengguna dan kepuasan pengguna terhadap aplikasi *e-purchasing* antara personil yang baru mengikuti pelatihan aplikasi dengan personil yang sudah pernah menggunakan aplikasi untuk proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Sleman. Penelitian yang dilakukan tertumpu pada aplikasi dan bagaimana kepuasan terhadap para pengguna aplikasi *e-purchasing* di Kab. Sleman. Ini berbeda dengan apa yang penulis teliti ada, yaitu melihat kesesuaian implementasi aturan hukum pelaksanaan *e-purchasing* dan melihat implikasinya sebelum dan sesudah *e-purchasing* dilaksanakan.

Tesis dari Bahrudin Yusuf yang berjudul “Strategi Bersaing CV Tunas Abadi Sebagai Holding Dalam Hal Pengadaan Barang Dengan Sistem E-Purchasing”.¹⁷ Penelitian ini mengulas tentang langkah-langkah perusahaan supaya dapat bersaing secara berkelanjutan dalam menjual produk-produk / barang dengan menggarap pasar pengadaan barang melalui jalur *e-procurment* pada katalog elektronik pemerintahan secara nasional. Hasil penelitian

¹⁶ Faisal Rahadian, “Analisis Perbandingan Penerimaan dan Kepuasan Pengguna Terhadap Aplikasi E-Purchasing di Pemerintah Kabupaten Sleman”, *Tesis*, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, 2015.

¹⁷ Bahrudin Yusuf T, “Strategi Bersaing CV Tunas Abadi Sebagai Holding Dalam Hal Pengadaan Barang Dengan Sistem E-Purchasing” *Tesis*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, 2016.

menunjukkan perusahaan yang dinamis dari sisi kebijakan dan SDM-nya akan mudah menangkap peluang, di mana perusahaan selalu memperbaiki kualitas SDM dan strategi internal serta uncontrollable, maka akan memenangkan persaingan.

Tesis dari Kusmini yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan E-Purchasing Obat Di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015”.¹⁸ Dalam penelitian ini dibahas mengenai permasalahan yang menghambat pelaksanaan *e-purchasing* obat di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, mencari tahu dampak dari hambatan pelaksanaan *e-purchasing* dan melihat efisiensi pembelian obat dengan *e-purchasing* dibanding dengan non *e-purchasing*. Hal ini tentu berbeda dengan apa yang penulis teliti yaitu, mengenai pelaksanaan *e-purchasing* di Dinas Pekerjaan Umum Bantul dan bagaimana implikasinya.

F. Kerangka Teori

1. Good Governance

Istilah *governance* secara harfiah dapat diartikan kegiatan pengarahan atau pembinaan. Puque sebagaimana dikutip oleh M.Ridha Suaib mendefinisikan *governance* yaitu suatu proses dalam mana suatu sistem sosial ekonomi atau sistem organisasi kompleks lainnya dikendalikan dan diatur. Sedangkan Pinto mendefinisikan *governance* sebagai praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam

¹⁸ Kusmin, “Evaluasi Pelaksanaan E-Purchasing Obat Di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015”, *Tesis*, Fakultas Farmasi, Universitas Gadjah Mada, 2016.

pengelolaan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya.¹⁹

Hal ini didasarkan pada pola perkembangan politik ke arah yang lebih demokratis dan reformasi serta dari perkembangan ekonomi yang merujuk pada ekonomi pasar yang membuat tidak lagi pemerintah, tetapi *civil society* dan *privat sector* lah yang memiliki peranan lebih dalam pemerintahan. Selain itu paradigma *good governance* adanya perubahan juga ada karena perubahan dalam paradigma pembangunan dengan meninjau ulang kembali pemerintah yang semula bertindak sebagai regulator dan pelaku pasar, menjadi bagaimana menciptakan iklim yang kondusif dan melakukan investasi prasarana yang mendukung dunia usaha.²⁰

a. Konsep *Good Governance*

Konsep *good governance* merupakan paradigma pemerintahan yang berkembang diberbagai Negara pada abad ke-21. Dilain pihak tak hanya pemerintahan yang menyikapi paradigam tersebut, IMF, Bank Dunia dan sejumlah institusi kaliber dunia lainnyapun turut memiliki definisi masing-masing sebagai sebuah cara untuk memperkuat kerja institusi pemerintahan serta suatu proses dimana rakyat bisa mengatur ekonominya, institusi dan sumber politiknya tidak hanya dipergunakan untuk

¹⁹ M.Ridha Suaib, *Pengantar Kebijakan Publik...*, hlm. 143-144

²⁰ *Ibid.* hlm. 144

pembangunan, akan tetapi juga menciptakan integrasi, kohesi dan untuk kesejahteraan rakyatnya.²¹

Dengan demikian dapat dikatakan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan itu sangat tergantung pada kualitas tata kelola pemerintahannya dimana pemerintah melakukan interaksi dengan sektor privat dan masyarakat .

Secara umum *good governance* menurut Bhatta mengandung unsur utama yang terdiri dari ²²:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas artinya adalah kewajiban bagi aparatur pemerintahan untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.

2. Transparansi

Pemerintahan yang baik akan bersifat transparan pada rakyatnya dan tidak menutup-nutupi segala hal yang patut diketahui oleh publik baik ditingkatan pemerintahan pusat hingga daerah. Secara sederhana, rakyat dapat mengetahui bagaimana suatu kebijakan publik dirumuskan, direncanakan hingga pada tahap implementasi pun diketahui secara jelas oleh rakyatnya.

²¹ Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik...*, hlm 109

²² M.Ridha Suaib, *Pengantar Kebijakan Publik...*, hlm. 147-149

Tindakan dan kebijakan pemerintah sepatutnya harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui khalayak banyak.

3. Keterbukaan

Keterbukaan dalam hal ini mengacu pada terbukanya kesempatan bagi siapapun dalam masyarakat untuk memperoleh informasi dan mengajukan tanggapan dan kritiknya atas pemerintah. Pemerintahan yang baik tentu akan memberikan segala informasi dengan sangat terbuka dan transparan agar dapat diakses secara luas oleh masyarakat.

4. Aturan hukum

Unsur aturan hukum dalam hal ini dapat diartikan bahwa *good governance* memiliki karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh. Secara singkat, bahwa kerangka landasan hukum telah dibentuk secara jelas, diketahui, dipahami dan dihormati setiap lapisan masyarakat dan dapat dilaksanakan berdasarkan prosedur yang baku. Dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi memanusiaikan pengguna kekuasaan dalam masyarakat. Adanya tatanan hukum menjamin bahwa orang atau golongan yang berkuasa tidak dapat bertindak sewenang-wenang.²³

²³ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta:Gramedia,1987) hlm. 78

Selain empat unsur diatas, *good governance* juga memiliki ciri lain yang terdiri dari beberapa rumusan dalam beragam asas yang berkembang di lingkungan administrasi Negara di Indonesia, yaitu ;

- 1) asas keseimbangan;
- 2) asas bertindak cermat;
- 3) asas tidak mencapuradukkan kewenangan;
- 4) asas permainan yang layak;
- 5) asas kebijaksanaan;
- 6) asas penyelenggaraan kepentingan umum;
- 7) asas profesionalitas;
- 8) asas akuntabilitas
- 9) asas keterbukaan
- 10) asas tertib penyelenggaraan negara
- 11) asas proporsionalitas.²⁴

2. Otonomi Daerah

Republik Indonesia yang berbentuk Negara Kesatuan, tampaknya otonomi daerah merupakan suatu kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di daerah. Dengan karakter wilayah yang sangat rumit dari sisi geografis dan sosiologis kemasyarakatan yang begitu kompleks, tentunya akan menyulitkan jangkauan pemerintah pusat ke daerah melalui sentralisasi. Hal ini menyebabkan ketidak merataan

²⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:Rajawali Pers,2014) hlm. 241-245. Lihat juga Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

pembangunan pada daerah-daerah tertentu yang tidak terjangkau dan tersentuh pembangunannya oleh pemerintah pusat.²⁵

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 yang dimaksud Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Syarif Saleh mengatakan, “otonomi itu sebagai hak mengatur dan memerintah daerah sendiri. Atas inisiatif dan kemauan sendiri, dimana hak itu diperoleh dari Pemerintah pusat”.²⁶ Bagir Manan sebagaimana dikuti Titik Tri Wulan merumuskan pengertian otonomi daerah yaitu, kebebasan dan kemandirian satuan pemerintahan yang lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan.²⁷

Otonomi daerah diatur secara tegas oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Namun demikian isi (wewenang) otonomi adalah urusan yang tidak diserahkan oleh pemerintah pusat (urusan pemerintah absolut).²⁸ Dengan demikian, konsekuensi dari adanya asas

²⁵ Vieta Imelda Cornelis, *Hukum Pemerintah Daerah Pengaturan Dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Di Wilayah Perbatasan Dan Pedalaman Dalam Perspektif Kedaulatan Bangsa*, (Surabaya:Aswaja Presindo,2016), hlm. 78

²⁶ *Ibid.* hlm. 80

²⁷ Titik Tri Wulan, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*,(Jakarta:Kencana Prenada, 2010) hlm. 255

²⁸ Dalam Pasal 9 Ayat 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Kemudian, urusan pemerintahan absolut diatur dalam Pasal 10

otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Pusat melaksanakan desentralisasi kewenangan. Desentralisasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah :

Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Wewenang pemerintahan yang diserahkan kepada satuan-satuan pemerintah daerah yaitu urusan pemerintah konkuren. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

3. Teori Reformasi Birokrasi

Kata Reformasi diarahkan pada terwujudnya efisiensi, efektivitas dan *cena government*. Reformasi ini diarahkan pada perubahan masyarakat yang termasuk didalamnya masyarakat birokrasi, dalam pengertian perubahan kearah kemajuan. Khan memberikan pengertian reformasi sebagai suatu usaha perubahan pokok dalam suatu sistem birokrasi yang bertujuan mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang telah lama. Reformasi ruang lingkupnya tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur dan sikap

yaitu meliputi: a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama.

tingkah laku. Arah yang akan dicapai adalah pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien.²⁹

Sementara itu birokrasi diartikan sebagai pegawai pemerintah yang menjalankan dan menyelenggarakan tugas yang ditentukan oleh konstitusi, menjalankan program pembangunan, pelayanan publik dan penerapan kebijakan pemerintah. Dalam konteks praktik pemerintahan di Indonesia, isu reformasi birokrasi ini menjadi sangat relevan utamanya untuk mempercepat krisis multidimensi yang belum selesai system birokrasi di Indonesia yang menjadi pilar pelayanan publik. Fakta sosial menunjukkan, kualitas pelayanan publik masih sangat rendah, tata kelola pengadaan barang dan jasa banyak menimbulkan keuangan Negara.

Leemans memberikan pengertian reformasi birokrasi diartikan sebagai spesies dari istilah reformasi administrasi organisasi. Leemans cenderung memaknai reformasi birokrasi sebagai reorganisasi mesin birokrasi atau perubahan yang secara sadar dan terarah dalam mesin birokrasi.³⁰

Gerald E-Caiden menyatakan bahwa istilah reformasi administrasi sering digunakan untuk berbagai kegiatan seperti penyempurnaan administrasi, pemeriksaan administrative, pembenahan ketidak beresan

²⁹ I Nyoman Sumaryadi, *Reformasi Birokrasi Pemerintahan Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 83

³⁰ Leemans Anne F, *The Management of Change in Government*, (Den Haag: Martius Nuhoff, 1976) hlm. 123

administrative, dan sarana untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.³¹

Menurut Rasyid pemerintah memiliki tiga fungsi utama, yaitu pelayanan service, pemberdayaan empowermet dan pembangunan development. Pelayanan akan membuahkan keadilan bagi masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian dan pembangunan akan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.³²

Era modern ini, tuntutan dan partisipasi masyarakat cukup kuat, birokrasi yang efektif, efisien, professional, transparan, komunikatif, akuntabel, dan memiliki visi pelayanan masyarakat yang baik serta bebas dari praktik-praktik KKN yang sangat membebani masyarakat. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap system penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga mampu menjaji tulang punggung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya, keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi akan sangat mendukung penciptaan *good governance* karena reformasi birokrasi merupakan inti dari upaya penciptaan *good governance*.

Pelembagaan reformasi birokrasi diejawantahkan dalam delapan area perubahan yang diharapkan. Kesemuanya mengarah pada :

³¹ Gerald E Caiden, *Prospects for Administrative Reform in Israel 2nd edition*, Vol 46 (1) (California: Palisade Publihers, 1962) hlm. 52

³² M.R. Rasyid, *Kajian Awal Birorasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru* (Jakarta: yasrif Watampone, 1997) hlm. 48

1. Penataan organisasi agar semua organisasi lebih tepat fungsi dan tepat guna
2. Penatalaksanaan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
3. Rekonsiliasi peraturan agar tidak tumpang tindih dan lebih memacu pada produktivitas dan kondusifitas
4. Penyelenggaraan sumber daya aparatur yang dikelola secara profesional dan berintegritas serta terhindar dari pelanggaran hukum
5. Pengawasan efektif yang membangun
6. Akuntabel dari segi kinerja maupun kapasitas
7. Berorientasi pada pemantapan pelayanan publik.
8. Mindset (pola pikir) dan cultureset (budaya kerja) yang reformatif dan inovasi.³³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dalam penyusunan skripsi ini, dengan cara melakukan wawancara dan pencarian data dilapangan yang terkait dengan penelitian ini. Tujuannya adalah untu mengetahui sejauhmana hukum bekerja dalam masyarakat. Dalam hal ini penelitian dimaksudkan untuk melihat implementasi peraturan

³³ Lampiran Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

perundang-undangan pada pelaksanaan *e-purchasing* di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Perumahan Kabupaten.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-*empiris*, dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui pengumpulan fakta-fakta hukum dari berbagai hasil dari wawancara, observasi lapangan dan dokumen yang didapat saat penelitian dan mengkaji norma-norma hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan.

3. Sumber Data

Sumber hukum terdiri dari dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Data Primer

Data primer merupakan bahan penelitian yang merupakan fakta-fakta empiris yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara online melalui pembelian langsung pada katalog elektronik (*e-purchasing*). Data primer tersebut didapatkan dengan cara wawancara langsung atau observasi dan melihat dokumen pada pelaksanaan *e-purchasing* oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul sebagai lokasi penelitian.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

1) Bahan hukum primer

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- c) Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan
- e) Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- f) Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- g) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- h) Peraturan Kepala LKPP Nomor 17 Tahun 2012 Tentang *E-Purchasing*

- i) Peraturan Kepala LKPP Nomor 17 Tahun 2012 Tentang *E-Purchasing*
- j) Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2015 Tentang *E-Purchasing*
- k) Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Katalog Elektronik dan *E-Purchasing*
- l) Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bantul.
- m) Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kab. Bantul
- n) Surat Edaran No. 1 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang/Jasa dengan Sistem *e-Purchasing*
- o) Surat Edaran No. 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Barang/Jasa melalui *e-Purchasing*
- p) Keputusan Deputi Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Nomor 7 Tahun 2015 tentang Syarat dan Ketentuan Pembelian Barang Secara *Online*

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan kajian-kajian teoritis berupa pendapat hukum, doktrin dan teori dan semua publikasi tentang hukum ataupun publikasi yang sifatnya ilmiah yang berkaitan dengan

penelitian ini. Bahan hukum tersebut meliputi: buku, jurnal, majalah, makalah, artikel dan lain-lain.³⁴

4. Metode analisis data

Metode pengumpulan data merupakan proses, prosedur atau cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan analisis *deskriptif-kualitatif*, yaitu suatu analisis yang diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut subaspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna pada dan hubungannya satu sama lain. Selanjutnya melakukan analisis terhadap hasil dari pengelompokkan data terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dan analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan hasil studi kepustakaan untuk diambil kesimpulannya secara logis terhadap permasalahan sesuai dari apa yang didapat saat penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi berjudul “Pengadaan Barang/Jasa Melalui Sistem *E-Purchasing* Perspektif *Good Governance* (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul” sistematika penulisan yang dipakai dan tersusun adalah sebagai berikut:

Bab I :merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI Press,2010), hlm. 11-12

pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab II : membahas tinjauan umum *good governance* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Didalam tinjauan ini akan diuraikan tentang penjelasan *good governance*, pengadaan barang/jasa, *e-procurement*, *e-purchasing* dan *katalog elektronik*

Bab III : menguraikan tinjauan umum mengenai Pemerintah Kabupaten Bantul. Selanjutnya tinjauan pada, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, tinjauan pelaksanaan *e-procurement* dan tinjauan pelaksanaan *e-purchasing* pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

Bab IV : berisi analisis dan pembahasan pelaksanaan *e-purchasing* pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

Bab V : merupakan bab Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang melalui sistem *e-purchasing* yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul pada tahun 2014 secara sederhana dilakukan dengan tahapan perencanaan, persiapan pemesanan barang melalui aplikasi, pengiriman dan penerimaan barang hingga pembayaran. Kemudian, dalam analisis pada BAB sebelumnya, pelaksanaan *e-purchasing* pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul pada tahun 2014 dapat dikatakan telah sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2012 tentang *E-purchasing*. Pengadaan *e-purchasing* berimplikasi pada proses pengadaan yang lebih pendek dan lebih cepat, efektif dan efisien dari waktu dan harga, adanya persaingan usaha yang sehat, mempermudah realisasi anggaran, dan mempermudah mencari barang yang dibutuhkan dengan kualitas yang terjamin.

Aspek *Good Governance* yang tercermin dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui *e-purchasing* pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul aspek transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, persaingan usaha dan kepastian hukum. Namun, meski begitu karena baru pertama kali diimplementasikannya

pengadaan melalui *e-purchasing* terdapat ketidak maksimalan dalam kebijakan dan perencanaan yang hanya pada pengadaan kendaraan. Selain itu, seharusnya kontak langsung terhadap penyedia harus dapat dihindari untuk menghindari terjadinya praktik pengadaan yang mengarah pada Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

B. SARAN

Setelah penulis melakukan penelitian, penulis memiliki saran untuk pihak-pihak terkait diantaranya :

1. Dengan melihat aspek penerapan *Good Governance* yang cukup signifikan dalam pelaksanaan *e-purchasing* dan memberikan banyak manfaat seperti dari segi waktu, hemat anggaran dan realisasi anggaran, kiranya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul harus berani melaksanakan kebijakan pelaksanaan *e-purchasing* tidak hanya pada kendaraan semata, tetapi dapat dilaksanakan *e-purchasing* bagi produk yang telah tersedia dan dibutuhkan oleh Dinas yang bersangkutan
2. Perlu adanya upaya untuk menambah aparatur yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa dalam Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul ditengah semakin banyaknya paket pekerjaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan dinas ini agar fungsi pemerintahan tetap berjalan lancar dan pelayanan publik tidak terhambat.

3. Dengan adanya payung hukum terbaru mengenai pengusulan barang/jasa untuk dimuat dalam katalog elektronik dan aplikasi yang juga sudah mendukung adanya katalog dengan komoditas lokal, Pemerintah Daerah Kab. Bantul bersama instansi lain mendorong dan membantu penyedia lokal dan memfasilitasi agar produknya dapat bersaing dan tertera dalam katalog elektronik agar roda pembangunan, persaingan usaha dan ekonomi masyarakat Bantul bisa semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

UUD Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-undang Nomor Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomo 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Perpres
Nomor 54 Tahun 2010

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas
Perpres Nomor 54 Tahun 2010

Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2012 tentang *e-Purchasing*

Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2015 tentang *e-Purchasing*

Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan *e-Purchasing*

Surat Edaran No. 1 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang/Jasa dengan Sistem *ePurchasing*

Surat Edaran No. 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Barang/Jasa melalui *e-Purchasing*

Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bantul.

Keputusan Deputi Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Nomor 7 Tahun 2015 tentang Syarat dan Ketentuan Pembelian Barang Secara Online

BUKU

Ahimsa, Heddy Shri *Minawang Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan*,
Yogyakarta:Gadjah Mada University Press,1988

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta:Kencana Prenada,2013.

Anggara, Satya. *Ilmu Administrasi Negara Kajian Konsep, Teori dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*, Bandung;Pusataka Setia,2012

Amiruddin. *Korupsi Dalam Pengadaan Brang Dan Jasa*, Yogyakarta:Genta Publishing,2010

- Akadun, *Teknologi Informasi Administrasi*, Cetakan pertama
Bandung:Alfabeta,2009
- Eko, Richardus. *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*.
Yogyakarta: ANDI,2004
- Cornelis, Vieta Imelda. *Hukum Pemerintah Daerah Pengaturan Dan Pemebntukan Daerah Otonomi Baru Di Wilayah Perbatasan Dan Pedalaman Dalam Perspektif Kedaulatan Bangsa*, Surabaya:Aswaja Presindo,2016
- Falih Suaedi Bintor Wardiyanto. *Revitalisasi Administrasi Negara Reformasi Birokrasi dan E-Governance*, Cetakan ke-I,Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010
- Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Pubik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*, cetakan ke-I, Malang: Gava Media,2011.
- Huda,Ni`matul, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Rajagrfindo,2014
- Huda, Ni`matul, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*,Yogyakarta:UII Press,2014
- Kuncoro, Agus. *Begini Tender Yng Benar*,Yogyakarta:Primaprint,2013
- Lukito, Penny Kusumastuti, *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi Kedepan*
Jakarta:Grasindo,2014
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada,2005

- M.R. Rasyid, *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru*
Jakarta: Yasrif Watampone, 1997
- Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1982
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju,
2008
- Purwosusilo. *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa*. Jakarta: Kencana
Prenada, 2014.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Cetakan ke-10, Jakarta:
Rajawali Pers, 2014
- Sedarmayanti, *Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik Bagian Kedua
Edisi Revisi Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan
Produktivitas Menuju Good Governance*, Bandung: Mandar Maju, 2012
- Sesung, Rusdianto. *Hukum Otonomi Daerah Negara Kesatuan Daerah Istimewa
Dan Daerah Otonomi Khusus*. Bandung: Refika Aditama 2013
- Sirajudin dkk. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang: Setara Press,
2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Suaib, Muhammad Ridha, *Pengantar Kebijakan Publik Dari Administrasi
Negara, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Good
Governance, Hingga Implementasi Kebijakan*,
Yogyakarta: Calpulis, 2016.

- Sumardi, I Nyoman . *Reformasi Birokrasi Pemerintahan Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Cetakan Pertama, Bogor:Ghalia Indonesia,2016
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya*.Jakarta:Sinar Grafika,2008
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta:Gramedia,1987
- Tanya, Bernard L. dan Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum “Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi”*, Malang:Genta Publishing, 2013
- Thamrin, Husni, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia,Cetakan ke II*, Yogyakarta:Aswaja Pressiondo,2013
- Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta:Kencana Prenada, 2013
- Welasari dan Inu Kencana, *Ilmu Administrasi*, Cetakan I, Yogyakarta;Pustaka Pelajar,2015
- Wibawa, Samodra. *Administrasi Negara Isu Isu Kontemporer*,Yogyakarta:Graha Ilmu,2009.
- Wirman Syafri, *Studi Tentang Administrasi Publik*, (Jakarta:Erlangga,2012)

KARYA ILMIAH

- Aprelly, Septian. Studi Pengaruh Penerapan *E-Procurement* Terhadap Kinerja Dan Efisiensi Pengadaan Jasa Konstruksi Di Pemerintah Kota Yogyakarta,

- Tugas Akhir*, Diploma Teknik Sipil, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, 2014
- Fandrito, Pria Kurnia Studi Kesiapan Perusahaan Konstruksi Dalam Penerapan E-Procurement Di Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan, *Tesis*, Magister Teknik Sipil, Univeristas Atma Jaya Yogyakarta, 2012
- Istiqlal, Ayundha. Hubungan Patron Klien Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Politik, Universitas Hasanudin Massar, 2016
- Kusmin, “Evaluasi Pelaksanaan E-Purchasing Obat Di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015”, *Tesis*, Fakultas Farmasi, Universitas Gadjah Mada, 2016
- Ningsih, Andryani. “Hubungan Penerapan Elektronik Katalog Terhadap Efisiensi Pengadaan Dan Ketersediaan Obat Di Rsud Kelas B Yogyakarta”, *Tesis*, Prodi Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Gadjah Mada, 2015.
- Rahadian, Faisal. Analisis Perbandingan Penerimaan Dan Kepuasan Pengguna Terhadap Aplikasi E-Purchasing Di Pemerintah Kabupaten Sleman, *Tesis*, Fakultas Teknik. Universitas Gadjah Mada, 2015
- Risky N, Gusty Abdillah. “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Sistem E-Purchasing”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2015.
- Yusuf T, Bahrudin. “Strategi Bersaing CV Tunas Abadi Sebagai Holding Dalam Hal Pengadaan Barang Dengan Sistem E-Purchasing” *Tesis*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, 2016.

Sumber lainnya

Asian Development Bank, *e-Government Procurement Handbook*, Philippines, 2013

Carunia Mulya F, *Konsep Kebijakan Good Governance: Suatu Tinjauan Ekonomi*, *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. XVIII (2). 2010

Christine Tonkin, *E-Procurement In The Public Sector: Story, Myth And Legend*, Makalah yang dipresentasikan di The Policy Institute, Trinity College Dublin, 18 November 2003 https://www.tcd.ie/policy-institute/assets/pdf/PIWP07_Tonkin.pdf akses 21 April 2017 13.33

Depdagri-LAN, *Modul Kebijakan Pelayanan Publik, Diklat Teknis Pelayanan Publik, Akuntabilitas dan Pengelolaan Mutu (Public Services, Accountabilty, and Quality Management)*. Jakarta, 2007.

Gerald E Caiden, *Prospects for Administrative Reform in Israel 2nd edition*, Vol 46 (1), California: Palisade Publihers, 1962

International Fund For Agricultural Development, *Good Governance: An Overview*, Roma, 1999

Jasin, Mochamad Dkk, *Mencegah Korupsi Melalui E-Procurement Meninjau Keberhasilan Pelaksanaan Eprocurement Di Pemerintah Kota Surabaya*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2007

Kishor Vadiya, A.Sm Sajeew Dan Guy Calender, Critical Factors That Influence E-Procurement Implementation Success In The Public Sector, *Journal Of Public Procurement*, Volume 6, Issues 1 & 3, 2006.

Leemans Anne F, *The Management of Change in Government*, (Den Haag: Martius Nuhoff, 1976)

Simone Croom And Alistair Brandon-Jones, Impact Of E-Procurement: Experiences From Implementation In The Uk Public Sector, *Journal Of Purchasing & Supply Management*, 2007

Yudho Giri dan Yoya Ruldeviyani, Implementasi *e-Procurement* sebagai Inovasi Pelayanan Publik, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2009

Yunus Harjito, E-Procurement : Peluang dan Tantangan Bagi Pemerintah Daerah, *Jurnal Istiqadsha*, 2015

eprints.undip.ac.id/34086/5/1932_CHAPTER_II.pdf akses 15 April 2017 Pukul 18:36 WIB

<http://nasional.kompas.com/read/2016/06/27/17234861/negara.rugi.hampir.rp.1.tiliun.dari.korupsi.pengadaan.barang.dan.jasa> akses 28 Februari 2017 Pukul 20:22 WIB

<http://jogja.antarane.ws.com/berita/342503/sejumlah-proyek-pengadaan-barang-di-bantul-tertunda> akses 18 Maret 2017 Pukul 14:12

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/21193-e-purchasing-tanpa-korupsi> akses 23 April 2017 Pukul 11:48

Abu Sopian, *E-Purchasing Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Balai

Diklat Keuangan Palembang, 2015

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/21765-e-purchasing-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah> Akses 4 April 2017 Pukul 12:53

https://e-katalog.lkpp.go.id/page/konten_dinamis/view/23?km=blog_roll akses 16 April 2017 Pukul 18:48

<http://www.technokonstruksi.com/techno-berita/37-penerapan-katalog-elektronikue-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah> Akses 24 April 2017 Pukul 09:20 WIB.

<http://samsulramli.com/tidak-pakai-katalog-di-pidanakan/> akses 1 Mei 2017 Pukul 14.22



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 94 /Un.02/DS.1/PN.00/ 4 /2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

10 April 2017

Kepada
Yth. **Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta**
Cq. Kepala BAKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :


No	Nama	NIM	PRODI
1.	Yogi Miftahul Fahmi	13340065	IH

Untuk mengadakan penelitian di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab.Bantul dan Unit Layanan Pengadaan Kab.Bantul guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul :

PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SISTEM E-PURCHASING PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE (STUDI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BANTUL)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 1546 / S1 / 2017

Menunjuk Surat : Dari : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah DIY Nomor : 074/3943/KESBANGPOL/2017

Mengingat : Tanggal : 18 April 2017 Perihal : Rekomendasi Penelitian

a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada

Nama : **YOGI MIFTAHUL FAHMI**

P. T / Alamat : **Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta**

NIP/NIM/No. KTP : **Jl. Marsda Adisucipto**

Nomor Telp./HP : **3213301101960002**

Tema/Judul Kegiatan : **081326039597**

Lokasi : **PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SISTEM E-PURCHASING PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE (STUDI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BANTUL)**

Waktu : **Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Unit Layanan Pengadaan Kab. Bantul**

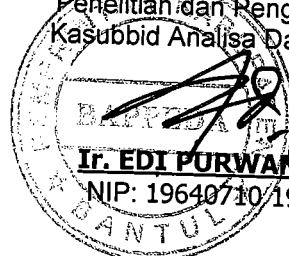
19 April 2017 s/d 19 Juni 2017

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : B a n t u l
Pada tanggal : 19 April 2017

A.n. Kepala,
Kepala Bidang Pengendalian
Penelitian dan Pengembangan u.b.
Kasubbid Analisa Data dan Laporan



Ir. EDI PURWANTO, M.Eng.
NIP: 19640710/199703 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)

2. Kepala Kantor Kecamatan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136. 551275. Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 18 April 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/3943/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Bupati Bantul
Up. Kepala BAPPEDA Bantul
Kabupaten Bantul
Di

BANTUL

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-941/Un.02/DS.1/PN.00/4/2017
Tanggal : 10 April 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SISTEM E-PURCHASING PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE (STUDI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BANTUL)"** kepada:

Nama : YOGI MIFTAHUL FAHMI
NIM : 13340065
No. HP/Identitas : 081326039597 / 3213301101960002
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas/PT : Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Dinas Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bantul, DIY
Waktu Penelitian : 24 April 2017 s.d. 25 Mei 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IRWAN SURTANO
Jabatan : ketua LSM MTB
NIP :
Instansi : LSM MTB
Alamat : KLOJEN, SEGOLOLO, Pleret, bambu

Menerangkan bahwa nama dibawah ini :


Nama : Yogi Miftahul Fahmi
NIM : 13340065
Alamat : Sapen, Demangan, Yogyakarta
Pendidikan : Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal ...16...Mei..... 2017
bertempat di ...Bambu..... guna
melengkapi data skripsi yang berjudul “ **Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui
Sistem E-Purchasing Perspektif Good Governance (Studi Pada Dinas Pekerjaan
Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman** ”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16. mei 2017


(IRWAN SURTANO.....)

Kelola Paket

Validasi Cetak Pesanan

Refresh

Cari Nama Paket

Aktivasi Paket - Semua -

Status Paket - Semua -

Satuan Kerja

Posisi Paket di - Semua -

Status Negosiasi - Semua -

Urut Berdasarkan Tanggal Buat (terbaru)

Item per Halaman 20 item

Filter Data

Reset

#	ID Paket	Nama Paket	Nama Penyedia	Jenis Kendaraan Bermotor	Instansi	Satuan Kerja	Status Paket	Posisi Paket di	Status Negosiasi	Tanggal		Total Harga (Rp)	Surat Pemesanan
										Buat	Edit		
1.	11627	Belanja Motor Roda Tiga	PT. Asean Motor International	1	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bantul	PPK Setuju. Pembelian diproses.	PPK	Sepakat	25 November 2014	n/a	25,170,000.00	Download
2.	10995	Pengadaan Mobil	PT. SUZUKI INDOMOBIL SALES Mobil	1	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bantul	PPK Setuju. Pembelian diproses.	PPK	Sepakat	14 November 2014	n/a	180,810,000.00	Download
3.	3471	Pengadaan dump Truck UPT KP3	PT. New Ratna Motor	1	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum	PPK Setuju. Pembelian diproses.	PPK	Sepakat	05 Juni 2014	05 Juni 2014	295,952,000.00	Download
4.	436	Belanja Modal Pengadaan Alat alat Angkutan Darat Bermotor/ Pengadaan Mobil Dinas	PT. New Ratna Motor	1	Kabupaten Bantul	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB BANTUL	PPK Setuju. Pembelian diproses.	PPK	Sepakat	19 Maret 2014	n/a	308,200,000.00	Download

Pencarian Paket Nasional Tahun Anggaran 2014

Tampilkan 10 entri

No	Paket	Pagu (Rp)	Jenis Pengadaan	Pemilihan	K/L/D/I	Satuan Kerja	Lokasi	ID
1	Pengadaan Mobil Dinas (/sirup /rup/detailPaketPenyedia?idPaket=1302554)	350.000.000	Barang	29 April 2014 00:00	Kabupaten Bantul	DINAS PEKERJAAN UMUM	Kabupaten Bantul	1302554
2	Rehabilitasi Rumah Dinas Bupati (/sirup /rup/detailPaketPenyedia?idPaket=1432505)	1.000.000.000	Pekerjaan Konstruksi	16 Mei 2014 00:00	Kabupaten Bantul	DINAS PEKERJAAN UMUM	Kabupaten Bantul	1432505
3	Rehab. Rumah Dinas Camat Pajangan (/sirup /rup/detailPaketPenyedia?idPaket=1432348)	500.000.000	Pekerjaan Konstruksi	16 Mei 2014 00:00	Kabupaten Bantul	DINAS PEKERJAAN UMUM	Kabupaten Bantul	1432348
4	Pembangunan Dinas Perindagkop (/sirup /rup/detailPaketPenyedia?idPaket=1432215)	2.500.000.000	Pekerjaan Konstruksi	16 Mei 2014 00:00	Kabupaten Bantul	DINAS PEKERJAAN UMUM	Kabupaten Bantul	1432215
5	Rehab. Rumah Dinas Camat Imogiri (/sirup /rup/detailPaketPenyedia?idPaket=1432336)	500.000.000	Pekerjaan Konstruksi	16 Mei 2014 00:00	Kabupaten Bantul	DINAS PEKERJAAN UMUM	Kabupaten Bantul	1432336

dinas

Semua

bantul

dinas peker

Semua

Semua

Pencarian Paket Nasional Tahun Anggaran 2014

Tampilkan 10 entri

No	Paket	Pagu (Rp)	Jenis Pengadaan	Pemilihan	K/L/D/I	Satuan Kerja	Lokasi	ID
1	Pengadaan Dump Truck UPT KP3 (/sirup/ru/detailPaket?Penyedia?idPaket=1503366)	350.000.000	Barang	29 April 2014 00:00	Kabupaten Bantul	DINAS PEKERJAAN UMUM	Kabupaten Bantul	1503366

Pengadaan Dump

Semua

bantul

dinas peker

Semua

Semua

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Pertama

Selanjutnya

1

Terakhir

Pencarian Paket Nasional Tahun Anggaran 2014

Tampilkan entri

No	Paket	Pagu (Rp)	Jenis Pengadaaan	Pemilihan	K/L/D/I	Satuan Kerja	Lokasi	ID
1	Belanja Motor Roda Tiga (/sirup/ru/detailPaket?Penyedia?idPaket=1956601)	26.000.000	Barang	19 November 2014 00:00	Kabupaten Bantul	DINAS PEKERJAAN UMUM	Kabupaten Bantul	1956601
belanja motor		Semua		bantul		dinas peker		Semua

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Pertama Sebelumnya Selanjutnya Terakhir

Detail Paket

Nama Paket Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor/ Pengadaan Mobil

Dinas 436
 ID Paket Kabupaten Bantul
 Instansi DINAS PEKERJAAN UMUM KAB BANTUL
 Satuan Kerja JL. P. SENOPATI PALBANG BANTUL, TELP 0274367310
 Alamat Satuan Kerja
 Nama Panitia Rusdy Aryanta
 No Telp. Panitia 081227085307
 Email Panitia rudielfas@gmail.com
 Status Paket Aktif
 Tanggal Buat 19 Maret 2014
 Tanggal Edit n/a
 Jenis Produk Kendaraan : 1 Kendaraan Bermotor
 Total Harga Rp. 308.200.000,00

Info Distributor

Nama Distributor n/a
 Alamat n/a
 Provinsi n/a
 No. Telp n/a
 No. Fax n/a
 Email n/a
 Penanggung Jawab n/a

Daftar Kendaraan Bermotor Riwayat Pembayaran Riwayat Paket Riwayat Negosiasi

PT. New Ratna Motor
 Jl. Setiabudi No. 22 Semarang
 osceasmoo@gmail.com
 024 - 7476000

#	Alat Kesehatan	Kuantitas	Oleh	Revisi	Rev. 0	Rev. 1	Rev. 2
1.	Mobil KIJANG INNOVA 2.0 V AUTOMATIC LUXURY	1	Tanggal Harga Negosiasi Harga Satuan Termasuk Ongkir Total Harga		Panitia Rusdy Aryanta 19 Maret 2014 12:58:23 Rp 311.030.000,00	Panitia Rusdy Aryanta 19 Maret 2014 13:17:37 Rp 306.100.000,00	Penyedia PT. New Ratna Motor 19 Maret 2014 13:22:12 Rp 308.200.000,00
					311.030.000,00	306.100.000,00	308.200.000,00
					311.030.000,00	306.100.000,00	308.200.000,00

Refresh Close

Detail Paket

Nama Paket Belanja Modal Pengadaan Alat alat Angkutan Darat Bermotor/ Pengadaan Mobil Dinas
ID Paket 436
Instansi Kabupaten Bantul
Satuan Kerja DINAS PEKERJAAN UMUM KAB BANTUL
Alamat Satuan Kerja JL. P. SENOPATI PALBAPANG BANTUL, Telp 0274387310
Nama Panitia Rusdy Aryanta
No. Telp. Panitia 081227086307
Email Panitia rusdiefais@gmail.com
Status Paket Aktif
Tanggal Buat 19 Maret 2014
Tanggal Edir n/a
Jenis Produk Kendaraan 1 Kendaraan Bermotor
Total Harga Rp 308.200.000,00

Info Distributor

Nama Distributor n/a
Alamat n/a
Provinsi n/a
No. Telp n/a
No. Fax n/a
Email n/a
Penanggung Jawab n/a

Daftar Kendaraan Bermotor Riwayat Pembayaran Riwayat Paket Riwayat Negosiasi

PT. New Ratna Motor
 Jl. Setiabudi No. 22 Semarang
 gsoasrsmoco@gmail.com
 024 - 7476000

Tanggal	Oleh	Keterangan
19 Maret 2014 12:58:23	Panitia: Rusdy Aryanta (RUSDYULP)	Paket dibuat
19 Maret 2014 13:09:10	Panitia: Rusdy Aryanta (RUSDYULP)	Update negosiasi (rev. 1)
19 Maret 2014 13:09:10	Panitia: Rusdy Aryanta (RUSDYULP)	Menyetujui negosiasi (rev. 1)
19 Maret 2014 13:11:29	Panitia: Rusdy Aryanta (RUSDYULP)	Update negosiasi (rev. 1)
19 Maret 2014 13:11:29	Panitia: Rusdy Aryanta (RUSDYULP)	Menyetujui negosiasi (rev. 1)
19 Maret 2014 13:13:04	Panitia: Rusdy Aryanta (RUSDYULP)	Update negosiasi (rev. 1)
19 Maret 2014 13:13:04	Panitia: Rusdy Aryanta (RUSDYULP)	Menyetujui negosiasi (rev. 1)

Refresh Close

Detail Paket

Nama Paket Belanja Modal Pengadaan Alat alat Angkutan Darat Bermotor/ Pengadaan Mobil Dinas
ID Paket 436
Instansi Kabupaten Bantul
Satuan Kerja DINAS PEKERJAAN UMUM KAB BANTUL
Alamat Satuan Kerja JL. P. SENOPATI PALBAPANG BANTUL, TELP 0274367310
Nama Panitia Rusdy Anyanta
No Telp. Panitia 081227085307
Email Panitia rusedlelals@gmail.com
Status Paket Aktif
Tanggal Buat 19 Maret 2014
Tanggal Edisi n/a
Jenis Produk Kendaraan 1 Kendaraan Bermotor
Total Harga Rp 308.200.000,00

Daftar Kendaraan Bermotor

Riwayat Pembayaran	Riwayat Paket	Riwayat Negosiasi
PT. New Ratna Motor Jl. Setabudi No. 22 Semarang gsonasamoco@gmail.com 024 - 7476000	Status Paket: PPK Setuju. Pembelian diproses. Posisi Paket di: PPK	Negosiasi Paniba Telah Setuju pada tanggal 20 Maret 2014 10:22:15 Penyedia : Telah Setuju pada tanggal 19 Maret 2014 13:22:12

Cetak Pesanan

Distributor
 PT. NASMOCC BANTUL
 JL. RINGROAD SELATAN, TMAN TIRTO, KASIHAN, BANTUL, YOGYAKARTA
 Email: nasnccdbantuls@gmail.com | tntirto_kasihian@yahoo.com No. Telp: 0274-4469567 No. Fax: 0274 - 4469568
 Penanggung Jawab: ANDI NAPU No. HP: 08161252566

#	Nama Kendaraan Bermotor	Provinsi	Lokasi	Kuantitas	Harga Kesepakatan	
					Harga Satuan Termasuk Ongkir(Rp)	Total Harga (Rp)
1.	Mobil TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 V AUTOMATIC LUXURY	DI Yogyakarta	Kab Bantul	1	308.200.000,00	308.200.000,00

Refresh Close

"Mohon kepada calon pembeli kendaraan bermotor e-katalog LKPP agar memilih harga yang termurah apabila menemukan tipe, model, merk yang sama pada suatu daerah yang sama"

CURRICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

Nama Legkap : Yogi Miftahul Fahmi

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, Tanggal, Lahir : 11 Januari 1996

Alamat Asal : Dusun Bojong Sangkem Desa Bojong Tengah
RT07/RW02 Kec.Pusakajaya, Kab. Subang,
Prov. Jawa Barat

Agama : Islam

Email : yogimf196@gmail.com

No. HP : 081326039597



B. Riwayat Pendidikan

Jenjang	Nama Institusi	Tahun
SD	SDN Dipatiukur	2001-2007
SMP	SMP Negeri 1 Pusakajaya	2007-2010
SMA	SMA Negeri 1 Subang	2010-2013
S1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2013-Sekarang

C. Pengalaman Organisasi

1. Ketua KOPSIS SMA Negeri 1 Subang 2011-2012
2. Direktur Lembaga Hukum Mahasiswa Islam (LHMI) Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum Periode 2014-2015

3. Sekretaris Umum HMI Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Periode 2015-2015

D. Pengabdian Masyarakat

1. Relawan Program Menyapa Indonesia Rumah Belajar Si Genta di Dukuh
Papak, Desa Kalirejo, Kab. Kulonprogo, 2015

